

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Organisasi profesi merupakan unsur penting karena sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi ketika pekerjaan tersebut memenuhi syarat atau kriteria yaitu memiliki organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya (Richey, 1973). Maka dari itu peran asosiasi profesi perpustakaan sangat dibutuhkan untuk pengembangan pustakawan dan keilmuan di Indonesia. Selain itu, asosiasi profesi juga perlu adanya tanggapan dari seorang profesional yang berprofesi sebagai pustakawan untuk lebih meningkatkan kontribusi dalam peningkatan profesionalisme pustakawan, sehingga asosiasi dapat lebih mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami pustakawan.

Penelitian mengenai organisasi atau asosiasi profesi dibidang ilmu perpustakaan masih jarang ditemui, padahal penelitian tentang hal tersebut sangat penting sebagai evaluasi dan memberikan pertimbangan kepada organisasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Namun peneliti menemukan penelitian sejenis dengan rumpun ilmu yang sama dan ada juga yang berbeda, penelitian yang sudah ada digunakan peneliti sebagai bahan referensi untuk menunjang penelitian ini.

Penelitian sejenis pertama dilakukan oleh Maesaroh (2012, p. iii - iv) dalam disertasi yang berjudul “*Education and Continuing Professional Development For Indonesian Academic Librarians*”. Tujuan penelitian tersebut diantaranya untuk

menilai kualifikasi pendidikan pustakawan perguruan tinggi saat ini, menilai kualifikasi pengembangan para ahli secara berkelanjutan yang dibutuhkan oleh pustakawan perguruan tinggi, dan menilai peran dari pendidikan dan *continuing professional development* dalam penyampaian layanan oleh pustakawan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey kuesioner ekstensif pada pustakawan dan kepala perpustakaan yang bekerja pada universitas negeri di Indonesia dan wawancara terhadap dua puluh dua partisipan, terdiri dari para cendekiawan akademis, kepala perpustakaan perguruan tinggi, ketua program studi dan ketua asosiasi profesi yang relevan. Penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi peran asosiasi pustakawan Indonesia untuk memberikan pendidikan berkelanjutan kepada pustakawan perguruan tinggi.

Penelitian sejenis kedua dilakukan oleh (Anggorowati, 2017, p. 117-130) dalam jurnal yang berjudul “Peran Forum Pustakawan Dalam Pengembangan Profesionalisme Pustakawan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang peran Forum Pustakawan dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pustakawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan wawancara.

Penelitian sejenis ketiga dilakukan oleh (Henawanto, 2014, p. 1-6) dalam jurnal yang berjudul “Persepsi Guru Terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru”. Penelitian tersebut membahas tentang kinerja Persatuan Guru Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif dan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Berdasarkan tiga penelitian sejenis tersebut peneliti mencoba untuk mengembangkan penelitian tentang organisasi atau asosiasi profesi. Seperti yang dijelaskan pada penelitian sejenis pertama bahwa peran asosiasi profesi direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas pustakawan perguruan tinggi, peneliti akan meneliti kontribusi organisasi atau asosiasi profesi dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan dan asosiasi yang dikaji yaitu Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia.

Pada penelitian sejenis kedua sudah melakukan penelitian tentang pengembangan profesionalisme pustakawan tetapi pada Forum Pustakawan UGM, belum mengarah kepada asosiasi perpustakaan. Penelitian sejenis ketiga merupakan penelitian tentang organisasi profesi namun pada bidang disiplin ilmu lain yaitu keguruan, peneliti gunakan sebagai referensi bacaan karena berkaitan dengan profesionalisme suatu profesi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Asosiasi Profesi Bidang Perpustakaan

Salah satu kriteria yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi adalah memiliki asosiasi profesional (Tafsir, 2012). Sebuah asosiasi didirikan agar setiap profesional dapat berkomunikasi dengan mudah dan mendapatkan sebuah informasi maupun pengetahuan untuk menciptakan arah dan tujuan bersama seperti yang dinyatakan Narayanan dan Raghu Nath (dalam Sudrajat, 2017, p. 53), organisasi didefinisikan sebagai “*an arena where human*

beings come together to perform complex tasks, so as to fulfill common goal(s)''.

Asosiasi profesi merupakan sarana bagi pustakawan untuk saling berdiskusi atau bertukar pikir mengenai kegiatan di perpustakaan untuk mencapai tujuan bersama.

Secara umum, asosiasi dapat membantu pustakawan memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pustakawan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh keaktifan diri sendiri mencari kebutuhan dan faktor eksternal merupakan dorongan dari orang lain (Mudlofir, 2012). Adanya asosiasi perpustakaan, pustakawan dapat saling belajar untuk membentuk satu pemikiran sama yang dituangkan pada visi-misi dan tujuan asosiasi. (*Survive&Thrive*, 2016, p. 1-7) berpendapat bahwa sebagian besar asosiasi memiliki fungsi utama yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan Kekuatan dan Kredibilitas kepada Profesi

Membangun komunikasi antar anggota untuk mencapai tujuan profesi, karena tujuan profesi tidak dapat dicapai oleh profesional secara individu. Melalui asosiasi profesi, pustakawan dapat saling mendukung dan menguatkan beragam pandangan untuk dijadikan satu tujuan profesi secara bersama untuk mendapatkan kekuatan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi pustakawan. Selain itu, citra baik dari asosiasi profesi juga turut meningkatkan kredibilitas profesi.

2. Fungsi Hukum dan Identitas Visual

Asosiasi harus terdaftar sesuai undang-undang negara untuk memastikan bahwa asosiasi mendapat legitimasi diakui oleh pemerintah untuk mewakili, membela, dan bertindak kepada anggota profesi. Penguatan terhadap identitas visual juga perlu dilakukan melalui peningkatan profil asosiasi sebagai kunci membangun kemitraan. Selain itu, perlu didukung situ *website* untuk membantu individu mengenal asosiasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang diberikan.

3. Membangkitkan keahlian profesional

Asosiasi perpustakaan sebagai saluran pengembangan pustakawan yang memberikan referensi perkembangan keilmuan terbaru melalui diskusi pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang dimiliki tiap individu. Asosiasi perlu mempertahankan anggota yang telah bergabung dan merekrut anggota baru guna membangkitkan keahlian profesional dan menambah keberagaman keahlian yang dimiliki. Asosiasi juga menciptakan program pengembangan profesional secara berkelanjutan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Guna menampung program tersebut asosiasi perlu membuat repository informasi dan sumberdaya sebagai sumber referensi informasi dan inovasi terbaru di lapangan.

4. Memberikan advokasi untuk profesi

Asosiasi perpustakaan melakukan advokasi untuk pengembangan dan implementasi peraturan profesi guna mendukung mekanisme yang melindungi masyarakat dan memastikan profesional yang aman dan kompeten. Asosiasi juga memberikan motivasi tenaga profesional baru dan pengalaman untuk

meningkatkan kualitas yang dimiliki serta mendukung penegakan etika dan pengembangan sanksi yang relevan untuk diterapkan pada profesional yang tidak sesuai aturan.

5. Menjaga kualitas sumber daya manusia

Asosiasi perpustakaan memiliki tanggung jawab dalam pendidikan dan pengembangan pustakawan, asosiasi meninjau perkembangan kualitas pendidikan yang dimiliki pustakawan secara berkala untuk menjamin kualitas pendidikan yang dimilikidengan memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk mendapatkan pengembangan pendidikan berkelanjutan atau *Continuing Profesional Develompment* (CPD). Pelaksanaan CPD bertujuan agar pustakawan dapat memperoleh perkembangan keilmuan terbaru dan diimplementasi kepada pekerjaan.

6. Membangun mitra strategis dengan lembaga pemerintahan maupun komunitas.

Membangun mitra strategis merupakan bentuk komunikasi asosiasi dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah (komunitas). Komunikasi dua arah antara asosiasi dengan pemerintah perlu dilakukan sebagai langkah pembuatan kebijakan yang sesuai dan mendukung advokasi untuk profesi.

Menurut (IFLA, 2010, p. 20-21) asosiasi perpustakaan perlu menggunakan sejumlah strategi untuk mencapai fungsi diatas, yaitu :

1. Pengembangan dan evaluasi bidang disiplin profesional melalui : riset, publikasi dan konferensi.
2. Berusaha menjalin koordinasi untuk membangun komunitas praktik.

3. Membangun kerangka kerja untuk mendukung praktik kerja terbaik melalui kode etik.
4. Membuat kebijakan dan menyiapkan isu-isu utama untuk profesi dan pemerintah.
5. Mengelola hubungan baik dengan komunitas dan mitra strategis eksternal lainnya seperti untuk penggalangan dana atau kegiatan kerjasama lain untuk tujuan advokasi. Manajemen berjejaring dengan pihak lain adalah fokus utama asosiasi.
6. Mempromosikan profesi melalui:
 - a. Meningkatkan profil - gambar dan status
 - b. Bekerja untuk meningkatkan gaji atau kondisi kerja, dan hubungan dengan serikat pekerja dan pengusaha.
 - c. Membangun kemitraan strategis dengan perpustakaan dan asosiasi dan lembaga profesional lainnya

Berdasarkan fungsi tersebut, aspek yang paling unggul adalah berkenaan dengan hubungan kerjasama dan pengembangan profesional. Pengembangan dan peningkatan profesionalisme pustakawan di Indonesia tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, kerjasama antar lembaga penting dilakukan agar dapat berkoordinasi untuk mencapai tujuannya secara bersamaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan pada *Building Strong Library Association Report Impact* (dalam IFLA, 2012), yaitu “*Strong library associations support and enrich society and the library and information profession. They unite a country’s library community around a common platform for advocacy and development of the profession*”.

2.2.2. Ikatan Sarjana Sebagai Asosiasi Profesi Bidang

Perpustakaan

Mengingat pentingnya suatu asosiasi profesi sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan profesional dan keilmuan, profesional dibidang perpustakaan membentuk suatu asosiasi profesi pada tahun 1973 yaitu *Indonesian Library Association (ILA)* atau saat ini dikenal Ikatan Pustakawan Indonesia untuk menampung aspirasi dan kreasi pustakawan, membangun citra baik pustakawan, dan mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi (Gani dan Zulfikar, 2009, p. 400).

Sebagai asosiasi profesi, lembaga tersebut menjadi penggerak dalam pengembangan profesi dan keilmuan. Peran asosiasi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pustakawan akan pendidikan dan kesejahteraannya. Fokus utama dari asosiasi perpustakaan yaitu pada profesionalisme sumber daya manusia atau pustakawan, karena peran pustakawan dianggap sebuah langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penyebaran informasi yang berkualitas. Sehingga fokus terhadap bentuk fisik perpustakaan bukan menjadi prioritas utama (Gani dan Zulfikar, 2009, p. 400).

Seiring perkembangan perpustakaan dan penerapan desentralisasi pemerintah membuat (*Indonesian Library Association*) tidak lagi menjadi asosiasi perpustakaan tunggal, banyak profesional bidang perpustakaan yang mendirikan asosiasi baru untuk memenuhi kebutuhannya sesuai lingkungan kerjanya. Daftar asosiasi perpustakaan yang ada di Indonesia, yaitu Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI), Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI), Forum

Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI), Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI), Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia (APISI), Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) (Zen, 2014, p. 143).

Banyaknya asosiasi perpustakaan di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran profesional perpustakaan akan hak dan kewajibannya sangat tinggi. Meskipun lembaga tersebut berbeda-beda akan tetapi memiliki inti tujuan yang sama yaitu meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan profesional. Terbentuknya asosiasi profesi baru, mendapatkan respon positif dari pustakawan Indonesia. Kehadiran asosiasi merupakan langkah baik untuk dapat memberikan penyegaran dan energi baru bagi perkembangan ilmu perpustakaan dan meningkatkan kualitas pustakawan (Zen, 2008, p. 9). Salah satu asosiasi yang umurnya masih muda adalah Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII)

ISIPII merupakan asosiasi perpustakaan yang dibentuk pada tahun 2006. Berdirinya ISIPII merupakan gagasan dan kesepakatan dari pengelola program studi ilmu perpustakaan dan informasi serta pustakawan-pustakawan praktisi (ISIPII, 2012). Kehadiran ISIPII memiliki pengaruh terhadap perubahan global yang terjadi pada peradaban ilmu perpustakaan dan informasi disesuaikan dengan perkembangan keilmuan di dunia. Tidak hanya keilmuan, bidang kerja pustakawan saat ini mengalami perubahan. Pustakawan tidak lagi harus di perpustakaan, tetapi

pustakawan sebagai “*Embedded Librarianship*” yang diartikan bahwa pustakawan berintergrasi dengan lembaga di luar perpustakaan (Husna, 2019.a, p. 354).

Intergrasi dengan lembaga lain membuat pustakawan harus dapat berkolaborasi dengan stakeholder non-pustakawan dan tidak lagi bersifat teknis. ISIPPII sebagai asosiasi perpustakaan menjadi wadah aspirasi lulusan sarjana ilmu perpustakaan informasi untuk saling bekerjasama dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu perpustakaan dan informasi.

2.2.3. Profesionalisme Pustakawan

Profesionalisme saat ini merupakan salah fenomena yang banyak dibahas, karena menggambarkan suatu kualitas atau ciri suatu profesi. Meskipun sering dibahas namun makna profesionalisme belum sepenuhnya diketahui, untuk lebih memahami makna tersebut akan dibahas dahulu mengenai profesi, profesional dan profesionalisme.

Profesi berasal dari kata kerja latin “*Profiteri*” yang artinya mengaku atau membuat komitmen atau sumpah. Menurut (Lester, 2015, p. 1) pernyataan tersebut ditafsirkan “ *As suggesting that joining a profession requires a commitement to acquiring its knowledge and skills, and to adopting its ethos*”. Menjadi pustakawan membutuhkan komitmen untuk aktif bekerja dan ikut serta dalam penerapan dan pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi.

Menurut *Good’s Dictionary of Education*, profesi merupakan suatu pekerjaan yang dipersiapkan khusus yang relatif lama pada tingkat perguruan tinggi dan tunduk pada sebuah kode etik (Purwono, 2013). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa profesi pustakawan merupakan sebuah pekerjaan yang

dilandasi oleh pendidikan atau keahlian pada bidang ilmu perpustakaan dan informasi dengan rentang waktu yang relatif lama dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, ada juga beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi, yaitu memiliki teori baku yang universal, memiliki kode etik, dan memiliki organisasi (Tafsir, 2012).

Pada sebuah profesi ada yang dinamakan profesional atau anggota dari suatu profesi. Istilah profesional digunakan untuk menggambarkan strata sosial tertentu dari pekerja yang berpendidikan baik, menguasai wilayah kerja yang cukup besar, dan biasanya terlibat dalam pekerjaan intelektual dan kreatif (Yaya dan Kikelomo, 2015, p. 71).

Penjelasan mengenai profesi dan profesional lebih fokus kepada kompetensi dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan. Selain berfokus pada kompetensi dan pengetahuan, seorang profesional dituntut untuk memiliki sifat kerja yang baik atau biasa di sebut profesionalisme. (Purwono, 2013) memiliki pendapat bahwa “Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja pada standar yang tinggi dan kode etik profesinya”. Pengertian tersebut menjelaskan seorang pustakawan dalam bekerja memerlukan kode etik untuk mengatur perilakunya ketika bekerja.

Profesionalisme merupakan sifat yang dimiliki pustakawan yang memiliki makna, mutu, kualitas, dan tingkah laku yang baik terhadap profesinya. Profesionalisme dapat mencerminkan kedudukan profesi pada masyarakat, masyarakat dapat menilai suatu profesi berdasarkan perilaku seorang pustakawan.

Tidak hanya sekedar menjalankan kewajibannya dalam bekerja, seorang seorang pustakawan juga harus dapat memaknai profesinya agar memiliki kedudukan profesi yang dipandang baik oleh masyarakat. Menurut (Hall, 1968, p. 93) profesionalisme memiliki lima dimensi, yaitu :

- a. *The use of the professional as a major references* (Teman sejawat sebagai referensi utama)

Seorang pustakawan masuk ke dalam asosiasi profesi bertujuan sebagai sumber acuan, baik asosiasi formal maupun informal. Asosiasi profesi memberikan kesempatan komunikasi dan berdiskusi mengenai pekerjaannya. Pustakawan dapat juga motivasi dari hasil diskusi dan komunikasi dengan teman sejawat. Maka seorang pustakawan dapat meningkatkan kesadaran akan profesinya.

- b. *Autonomy* (Kebutuhan mandiri)

Kebutuhan untuk mandiri merupakan prinsip yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan seorang Pustakawan. Seorang pustakawan memiliki hak untuk menentukan keputusannya sendiri dalam bekerja tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

- c. *Belief in self regulation* (Meyakini peraturan profesi)

Seorang pustakawan mengerti akan peraturan profesinya, profesi yang dimiliki hanya dapat dikerjakan oleh rekan sesama profesi. Tanpa ada aturan profesi, pustakawan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan benar.

- d. *A sense of calling to the field* (Dedikasi profesi)

Prinsip ini berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki saat bekerja. Pustakawan memerlukan komitmen untuk menjalankan

pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki dengan berorientasi kepada kepuasan rohani.

e. *A belief in service to the public* (Tanggungjawab sosial)

Prinsip ini berkaitan dengan pemaknaan seorang profesional terhadap profesinya yang berorientasi pada memberikan manfaat kepada masyarakat luas bukan pada diri sendiri atau pihak tertentu. Artinya pustakawan wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk menjalankan kewajiban sosialnya

Kelima dimensi tersebut perlu dimaknai bagi setiap anggota profesi untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas.

2.2.4. Pengembangan Profesionalisme Pustakawan

Pengembangan profesionalisme dilaksanakan dengan harapan seorang profesional dapat memiliki standar profesional yaitu keterampilan, kompetensi, dan karakter. Pustakawan sebagai profesional dituntut aktif meningkatkan keterampilan dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pustakawan sebagai profesional wajib mempunyai moral dan perilaku yang baik untuk mencerminkan profesionalisme profesi dalam dirinya ketika sedang melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan profesionalisme yaitu melalui pendidikan berkelanjutan atau *Continuing Professional Development*.

Regulasi mengenai pengembangan profesionalisme tersebut sudah tercantum di *Internasional Federation Library and Association* (IFLA). Sebagai asosiasi perpustakaan sudah kewajiban IFLA membuat kebijakan tersebut untuk meningkatkan profesional pustakawan di seluruh dunia. Maka (IFLA, 2016, p. 1)

membuat suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan, dimana pedoman tersebut berisikan 10 elemen pokok yaitu :

1. Pengakajian secara reguler terhadap kebutuhan pembelajaran seorang profesional.

Asosiasi memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi pustakawan sesuai dengan perubahan jaman. Keterbaruan informasi akan memingkatkan pengetahuan dan kineja pustakawan.

2. Cakupan pendidikan yang luas baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Pendidikan dan pelatihan wajib diberikan kepada pustakawan dalam berbagai bentuk baik formal maupun non-formal. Asosiasi menyediakan hak pendidikan bagi pustakawan yang dirancang dapat mencakup seluruh aspek, seperti pengetahuan teoritis, etika, dan moral.

3. Komitmen Organisasi

Pengembangan pustakawan sulit dilakukan secara mandiri karena kebiasaan pustakawan yang berbeda-beda. Dukungan dari tempat kerja dan asosiasi atau organisasi profesi pustakawan diperlukan untuk meningkatkan minat pustakawan dalam mengembangkan potensi diri. Peningkatan profesionalisme pustakawan dilakukan dengan konsisten dan bertahap untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Penyebaran informasi tentang pendidikan berkelanjutan

Keaktifan asosiasi diperlukan dalam menyebarkan dan mensosialisasikan pendidikan berkelanjutan karena tidak semua pustakawan mengetahui informasi mengenai pendidikan lanjutan. Penyebaran informasi tidak hanya

melalui satu saluran, informasi harus di sebarakan melalui media apapun yang memungkinkan.

5. Rancangan pendidikan berkelanjutan selaras dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi

Rencanakan pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pustakawan karena akan berbeda pada setiap tempat kerja. Segala aspek dalam kegiatan perlu diperhatikan mulai dari pengajar, materi, kondisi lapangan, dan umpan balik peserta atau pustakawan.

6. Mendokumentasikan secara lengkap dan konsisten atas pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan.

Untuk menunjukkan eksistensi lakukan kegiatan dokumentasi agar kegiatan yang pustakawan laksanakan dapat memberikan kenangan tersendiri. Selain itu, data pendidikan pustakawan juga perlu di dokumentasikan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dirinya.

7. Penyediaan Anggaran

Anggaran merupakan elemen yang tidak dapat terlepas pada suatu kegiatan. Setiap instansi dan asosiasi tentunya harus berkolaborasi untuk membuat kesamaan komitmen dan tujuan, misalnya instansi yang menyediakan dan lalu asosiasi yang melaksanakan kegiatan dengan tidak terlepas asosiasi juga memberikan kontribusi dananya.

8. Memberikan waktu khusus untuk CPD

Bekerjasama dengan instansi tempat pustakawan bekerja untuk diberikan waktu khusus memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan

kompetensinya. Meskipun harus melaksanakan kewajibannya di instansi pustakawan harus diberikan alokasi waktu minimal 10% dari waktu kerja karyawan untuk dapat berkesempatan mengikuti lokal karya, konferensi, latihan kerja, dan kegiatan pendidikan lain dalam rangka CPD.

9. Evaluasi pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesi

Setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan tentu harus melakukan evaluasi untuk mengetahui umpan balik dari peserta. Evaluasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan.

10. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CPD

Setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan pengembangan, asosiasi juga perlu melakukan evaluasi dari kegiatan yang telah terlaksana supaya dapat memberikan fasilitas yang lebih baik.